



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Erna Djuliawati
Lokasi : Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK.15/KPTS-IV/1999 tanggal 18 Januari 1999
Luas : ± 184.206 ha
Tanggal Penilaian : 23 September – 02 Oktober 2019

dengan hasil kinerja berpredikat “Baik” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (06 November 2017 s/d 05 November 2022).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok3
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 (DUA)
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT ERNA DJULIAWATI

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor /Ekologi)
Ir. Suwanto (Auditor Prasyarat)
Muhammad Ridwan S.Hut (Auditor Produksi)
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial)
Rinaldy Ramadhan D, S.Hut. (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifarahman
Didik Heru Untoro
Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT ERNA DJULIAWATI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 15/Kpts-IV/1999
- c. Luas dan Lokasi : 184.206 Ha,
Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Lyman Wing Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Karet
Tengsin, Jakarta Pusat 10220
Jl. Adi Sucipto Km-5, Pontianak, Kalimantan Barat
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0561) 739777
- f. Pengurus : Indradi Kusuma, S.H. (Komisaris Utama)
Leopard Lyman (Komisaris)
Ir. Iwan Djuanda (Direktur Utama)
Ir. Soeparto (Direktur)
Ir. Maman Surachman (Direktur)
David Lie (Direktur)
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-006

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	19 September 2019 Kementerian LHK	Koordinasi KLHK dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Erna Djuliawati dalam satu tahun terakhir.
	23 September 2019 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi KALTENG dan BPHP Wilayah X di Palangkaraya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi KALTENG. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Erna Djuliawati dalam satu tahun terakhir.
	2 Oktober 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi KALTENG dan BPHP Wilayah X di Palangkaraya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi KALTENG. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	25 September 2019, Di Base Camp Bukit Beruang PT Erna Djuliawati	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-2 PHPL di PT Erna Djuliawati • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada Auditee oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan. Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	24 September s/d Oktober 2018, di Base Camp Bukit Beruang PT Erna Djuliawati	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di base camp bukit Beruang PT Erna Djuliawati, areal produksi, lapangan dan masyarakat sekitar areal PT Erna Djuliawati.
Pertemuan Penutupan	29 September 2019, Base Camp Bukit Beruang PT Erna Djuliawati	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian status temuan atau rekomendasi tahun sebelumnya (Re-Sertifikasi) • Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL • Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 Oktober 2018, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Erna Djuliawati dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, terdiri dari akta pendirian perusahaan, akta perubahan terakhir akta Nomor : 14 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Rosita Rianauli Sianipar SH.MKn, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT, BATB dan SK Pengesahan batas definitif (Penguahan) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts-II/93 tanggal 11 Pebruari 1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3173/Kpts/VII-KP/2003 tanggal 4 Juli 2003.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK PT Erna Djuliawati telah mencapai 100% (tata batas telah temu gelang) dengan panjang 514.844 meter, dan telah mendapat Pengesahan batas definitif (Pengukuhan) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts-II/93 tanggal 11 Pebruari 1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3173/Kpts/VII-KP/2003 tanggal 4 Juli 2003.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Letak areal kerja PT Erna Djuliawati pada umumnya berbatasan dengan pemegang izin lainnya dan hutan lindung. Eksistensi areal kerja sudah mendapat persetujuan dari menteri kehutanan dan perkebunan tahun 1993, namun adanya selisih pergeseran antar peta kerja dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah - Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, menjadi sumber konflik batas dengan areal kerja yang telah ditata batas terlebih dahulu di lapangan dan telah mendapat SK Pengukuhan. Terhadap adanya pergeseran antar peta tersebut PT Erna Djuliawati telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Berdasarkan Surat Kepala BPKH Wilayah XXI Nomor : 392/BPKH.XXI/PKH/UM/9/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Tanggapan atas permohonan pemeriksaan batas di lapangan pada areal kerja HPHTI-TPTJ PT Erna Djuliawati, BPKH merencanakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan batas areal kerja PT Erna Djuliawati pada akhir bulan September atau awal bulan Oktober 2019. Terdapat aktifitas yang dapat mengganggu eksistensi areal kerja IUPHHK PT Erna Djuliawati, berupa perladangan masyarakat. Data Februari 2017 seluas 461,47 Ha, Data Januari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2018 seluas 438,92 Ha, Data Januari 2019 seluas 479,47 Ha. PT Erna Djuliawati telah melakukan upaya pencegahan terhadap adanya aktivitas perladangan melalui kegiatan sosialisasi dan patroli pengamanan hutan.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Berdasarkan hasil overlay Peta SK IUPHHK PT Erna Djuliawati dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012), diketahui bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan yang disebabkan adanya selisih pergeseran antar peta kerja dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Terhadap adanya pergeseran antar peta tersebut PT Erna Djuliawati telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Berdasarkan Surat Kepala BPKH Wilayah XXI Nomor : 392/BPKH.XXI/PKH/UM/9/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Tanggapan atas permohonan pemeriksaan batas di lapangan pada areal kerja HPHTI-TPTJ PT Erna Djuliawati. BPKH merencanakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan batas areal kerja PT Erna Djuliawati pada akhir bulan September atau awal bulan Oktober 2019.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang ada di dalam areal kerja PT Erna Djuliawati. Terhadap adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut, terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	BAIK	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya dituangkan pada naskah tertulis yang ditandatangani Direktur Utama pada tanggal 25 Juni 2012, dan dituangkan pada dokumen RKU Periode 2011 s/d 2020. Visi misi PT Erna Djuliawati telah sesuai dengan kerangka PHPL karena telah mencakup kelestarian kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan PT Erna Djuliawati telah disosialisasikan mulai level pemegang izin dan kepada masyarakat setempat. Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi berupa dokumen Berita Acara pelaksanaan kegiatan, materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi PHL sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi yang belum sesuai antara lain adalah realisasi penanaman blok RKT 2018 belum sesuai dengan target yang telah disusun (realisasi 63,7%), serta rata-rata realisasi penebangan tahun 2018 belum sesuai dengan rencana yang telah disusun (terrealisasi sebesar 79,9 % dari rencana).
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	BAIK	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. PT Erna Djuliawati sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Perdirjen PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet, Canhut, Nenhut, Binhut

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan PKB-R) dengan jumlah sebanyak 47 orang dari ketentuan sebanyak 27 orang.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Erna Djuliawati pada periode Tahun 2018 adalah 100 % dari rencana yang telah disusun sesuai kebutuhan, yaitu realisasi sebanyak 61 peserta dari rencana 61 peserta.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT Erna Djuliawati tersedia lengkap, termasuk Laporan Bulanan Tenaga Kerja, Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) UU No.7 tahun 1981, serta Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Erna Djuliawati Dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahut Indonesia (PUK SP Kahut Indonesia KSPSI) Periode Tahun 2018 s/d 2020 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan No. 560/954/DISNAKERTRANS/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	BAIK	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job description yang memadai, telah disahkan oleh Direksi dan sesuai dengan kerangka PHPL (telah memperhatikan aspek-aspek pengelolaan hutan lestari yaitu aspek produksi, ekologi, dan aspek sosial).
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki Perangkat SIM dan tersedia tenaga pelaksana. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan On-Line (SIPUHH On-Line) dan Sistem Informasi Manajemen PNBPN telah diterapkan dengan baik. PT Erna Djuliawati telah menerapkan E-Monev kinerja HA melalui Aplikasi berbasis WEB dengan alamat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>http://monevkinerjapha.menlhk.go.id. sesuai ketentuan yang berlaku Perdirjen PHPL No : P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016 tanggal 28 Maret 2016.</p>
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> , dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, karena telah menjangkau bidang perencanaan, bidang produksi, bidang sosial dan bidang lingkungan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Hasil pengawasan oleh tim SPI tahun 2019 terdapat jenis-jenis temuan yang menjadi dasar tindakan perbaikan berbasis Monev. dituangkan dalam tabel rekomendasi. Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan oleh manajemen berbasis monev dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah mencakup seluruh rekomendasi. Pada dokumen monev terdapat bukti rincian rencana perbaikan dan tindakan pencegahan terkait bidang perencanaan, binhut, produksi dan sosial.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	BAIK	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana pennebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Sebelum kegiatan operasional RKT 2019 dilaksanakan, PT Erna Djuliawati melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar. Tindak lanjut setelah kegiatan sosialisasi adalah adanya kesepakatan/persetujuan dari masyarakat terhadap rencana kegiatan operasional RKT 2019, ditandai dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai perwakilan masyarakat, dilanjutkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan acara kegiatan Selamatan/Syukur Pembukaan RKT 2019.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK PT Erna Djuliawati dari para pihak. Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK PT Erna Djuliawati telah mencapai 100% (tata batas sudah temu gelang) dan telah ditetapkan secara definitif (Penguahan) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts-II/93 tanggal 11 Pebruari 1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3173/Kpts/VII-KP/2003 tanggal 4 Juli 2003. Para pihak terkait dengan pelaksanaan tata batas telah menandatangani Berita Acara pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK PT Erna Djuliawati.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Program CSR/CD (PMDH) PT Erna Djuliawati tahun 2018 dan tahun 2019 ditujukan kepada 15 desa binaan. Dari sisi persetujuan proses pembuatan program PMDH tahun 2019 tidak diperoleh bukti adanya persetujuan dari para pihak (Desa Binaan). Dari sisi pelaksanaan terdapat persetujuan terhadap realisasi Program PMDH tahun 2018 dari 15 Desa Binaan (persetujuan 15/15=100%) dengan bukti berupa Berita Acara serah terima, sehingga rata-rata persetujuan dalam proses penetapan program PMDH dan pelaksanaannya mencapai (100/200=50%).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak. PT Erna Djuliawati telah menetapkan lokasi-lokasi kawasan lindung pada areal kerja sesuai dengan dokumen AMDAL dan dituangkan pada dokumen RKUPHHK Periode 2011-2020 yang telah mendapat persetujuan dari instansi berwenang. Prosentase persetujuan para pihak sudah mencapai 27/27=100 % terdiri dari SK Persetujuan AMDAL, SK Persetujuan RKU dan BA

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sosialisasi Kawasan Lindung dari 25 warga desa di dalam dan di sekitar areal kerja.

2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2011 s/d 2020 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai surat Keputusan No. 169/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan surat Keputusan No. 4000/MenLHK-PHPL/UHP/HPL1/6/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Erna Duliawati telah melakukan penataan areal kerja RKT 2019 dan RKT 2018 dengan tingkat kesesuaiannya letak terhadap RKUPHHK sebesar 100 % dan kesesuaian luas sebesar 99,93%
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Baik	PT Erna Djuliawati telah melakukan penandaan batas blok dan petak kerja di lapangan pada RKT 2019 dan RKT 2018, tanda batas di lapangan seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Erna Djuliawati sudah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB tahun 2010 dilengkapi peta pendukung, hasil ITSP tahun 2019 dan 2018 yang dilengkapi dengan peta pendukung berupa peta pohon skala 1 :1.000
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki data pengukuran riap tegakan /PUP pada areal bekas blok tebangan dan PSP pada areal blok TPTI-I dan TPTJ dan telah

		melakukan analisis berupa riap diameter (cm/th) dan tinggi (m/th). Dalam verifikasi pengukuran lapang terhadap 23 contoh, diperoleh selisih 0,60 cm atau 2,69%. Perbedaan < 5% sangat bagus
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT. Erna Djuliawati sudah melakukan analisis data potensi dan riap untuk diameter dan volume tegakan selama periode tertentu, dua tahun terakhir dan menyampaikan laporan ke dinas terkait tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT. Erna Djuliawati sudah membuat dan dapat menunjukkan ketersediaan SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur TPTJ yang lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku yaitu Permenhut P11/menhut-II/2009
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Erna Djuliawati telah mengimplementasikan seluruh SOP sistem silvikultur sesuai dengan tahapan sistem silvikultur TPTJ dan dapat menunjukkan lokasi untuk setiap aktivitas lapangan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Erna Djuliawati mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebanyak 65 batang/ha dan hasil uji petik sebanyak 150 pohon/ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Erna Djuliawati mempunyai pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 dengan nilai anakan tiang berjumlah 218 batang /ha (LOA) dan pancang 2.554 /ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan	Baik	

hasil hutan kayu.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Erna Djuliawati telah membuat dan dapat menunjukkan SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Erna Djuliawati telah menerapkan penebangan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan SOP yang telah dibuat dan dalam pelaksanaannya sudah mengacu kepada SOP RIL masing-masing kegiatan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	<i>Sedang</i>	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) untuk PT Erna Djuliawati berdasarkan dokumen PT. Erna Djuliawati sebesar 22,60%. Berdasarkan uji petik tim produksi kerusakan sebesar 19,00%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor Eksploitasi kegiatan pemanenan kayu di areal PT Erna Djuliawati sebesar 0,79
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Terdapat dokumen RKT lebih dari 50% yang disusun berdasarkan RKU periode 2011-2020 dan telah disahkan secara <i>self approval</i>
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Erna Djuliawati telah membuat peta kerja RKT Tahun 2019 dan 2018 yang menggambarkan blok RKT dan kawasan lindung dan sesuai dengan peta RKUPHHK periode 2011-2020
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Erna Djuliawati telah mengimplementasikan peta kerja RKT 2019 dan 2018 berupa penandaan pada seluruh batas blok dan petak tebangan beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa sempadan sungai dan terlihat jelas di lapangan
Verifier 2.5.4.	Sedang	Realisasi volume tebangan total sebesar

Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.		79,80% dan perkelompok jenis ada yang kurang dari 70% dari rencana tebang tahunan yaitu untuk kelompok kayu indah hanya mencapai 49,21% dan kelompok kayu lainnya (kulim) mencapai 58,95% pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial perusahaan PT Erna Djuliawati cukup sehat dengan Likuiditas 515,05% , Solvabilitas 100%, Rentabilitas positif dengan opini terhadap laporan keuangan adalah Wajar
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Erna Djuliawati pada tahun 2018 >80% yaitu sebesar 100,75 %
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Baik	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional perbedaan sebesar 8,51%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	PT Erna Djuliawati telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan dan sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Berdasarkan laporan keuangan, realisasi modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan secara keseluruhannya mencapai 90.12 % dari yang direncanakan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan	Sedang	PT Erna Djuliawati telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 94,23% dan kualitas tumbuh yang sehat 64%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	

<p>Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Erna Djuliawati telah mengalokasikan dan menetapkan sebagian areal yang dikelolanya seluas 15.951 Ha dari luas areal kerjanya sebagai kawasan dilindung sesuai dengan RKUPHHK-HA PT Erna Djuliawati Berbasis IHMB periode tahun 2011 – 2020 yang telah disahkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Menhut No. SK.169/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan SK Direktur yang terdiri atas Lereng > 40%, Buffer Zone Hutan Lindung, Kantong Satwa, Situs Budaya, Sempadan sungai, KPPN, Sempadan Mata air. Dan telah disesuaikan sesuai dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Erna Djuliawati periode 2011 – 2020 yang telah disahkan melalui KepMenLHK Nomor : SK.4000/MenLHK – PHPL/UHP/HPL1/2018, tanggal 21 Juni 2018, yaitu penambahan kawasan lindung sumber mata air HL Bukit Beruang seluas 175 Ha. Kondisi biofisik, baik fungsi, jenis dan tata letak kawasan lindung yang ada telah sesuai dengan dokumen perencanaan</p>
<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Erna Djuliawati telah melakukan penataan kawasan lindung yang telah dialokasikan sesuai dokumen Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2018, realiasi penandaan batas kawasan lindung sepanjang 472,86 Km dari target tahun 2018 yaitu 474,81 Km atau 99,59 %.</p>
<p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi</p>	<p>Baik</p>	<p>Berdasarkan hasil overlay Citra Landsat PT Erna Djuliawati, Citra Landsat PT Erna Djuliawati, Citra Landsat 8 OLI Band 653 Landsat 7 ETM + Band 542 Path 120 Row 61 Liputan tgl 14 Februari 2018 dan 12 Desember 2017, kawasan lindung yang masih berhutan seluas 15.951 Ha, hasil verifikasi dilapangan menunjukkan kondisi kawasan lindung dengan tutupan yang masih sangat baik.</p>
<p>Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Erna Djuliawati telah melakukan upaya sosialisasi untuk mendapatkan pengakuan terhadap kawasan lindung, hal ini dituangkan dalam dokumen Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan, sasaran</p>

		kegiatan ini adalah anak sekolah dan masyarakat, capaian pada tahun 2018 dari 14 desa binaan terealisasi sebanyak 15 Desa Binaan plus 1 Desa terdampak dan sebanyak 17 Sekolah SD dan SMP.
<p>Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.</p>	Baik	PT Erna djuliawati telah melaksanakan pengelolaan kawasan ,lindung berdasarkan dokumen perencanaan, RKL/RPL dan peraturan yang berlaku, yang dituangkan dalam laporan Rencana Kerja Tahunan, Laporan RKL-RPL dan Laporan Implementasi, Identifikasi, Pengelolaan, Monitoring Areal HCVF IUPHHK PT Erna Djuliawati Pada Kawasan Lindung Konervasi dan Situs Budaya Tahun 2018
<p>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	Baik	
<p>Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada</p>	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki Prosedur terkait Perlindungan Hutan, prosedur mencakup jenis-jenis gangguan seperti gangguan hutan, penanggulangan kebakaran, perladangan, pemanfaatan HHBK, Perburuan, penebangan tanpa izin dan hama penyakit tanaman
<p>Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan</p>	Sedang	Sarana Prasarana pengamanan hutan tersedia dengan baik dan seusai ketentuan, namun untuk sapras perlindungan hutan bidang kebakaran yang tersedia sebanyak 44 Jenis atau 97,78 % dari seharusnya sebanyak 45 Jenis, sedangkan secara jumlah terpenuhi sebanyak 988 pcs dari 1083 pcs atau 91,23 %, hal ini secara jumlah dan jenis belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PerMENLHK No. P. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
<p>Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan</p>	Sedang	PT Erna Djuliawati telah memiliki personil Satuan Pengamanan Hutan sebanyak 35 orang dengan kualifikasi personil telah sesuai ketentuan yakni telah mendapat pendidikan dan Latihan Satuan Pengamanan dari POLRI yang dibuktikan dengan Ijazah DIKLAT SATPAM, sedangkan personil Brigade Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

		sebanyak 45 orang, kualifikasi personil sebanyak 30 orang telah terpenuhi sedangkan 15 orang belum sesuai ketentuan, yaitu belum mendapat DIKLAT pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari Instansi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT Erna Djuliawati telah melakukan upaya upaya perlindungan gangguan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan dan tindakan yang sesuai dengan kondisi gangguan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana dan Prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT Erna Djuliawati sesuai hasil verifikasi dokumen dan lapangan, menunjukkan keberadaan dan fungsinya bekerja dengan baik dan jenisnya telah sesuai dengan ketentuan (dokumen AMDAL dan Peraturan yang berlaku) dan peruntukannya
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah kualifikasi yang sesuai, yaitu tersedia sebanyak 13 GANIS PHPL-BINHUT, dari seharusnya 8 orang (PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015)
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan berupa Rencana Kelola Lingkungan AMDAL tahun 1997 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA 2018, yang dalam pelaksanaannya diturunkan dan prosedur kerja. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan dan peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam laporan

		pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan dilaporkan setiap semester kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Dinas lingkungan Hidup Prov. Kalteng dan Dinas Lingkungan Hidup Kab Seruyan, serta KLHK.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan AMDAL tahun 1997 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA 2018, yang dalam pelaksanaannya diturunkan dan prosedur kerja. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan dan peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam laporan pelaksanaan Pemantauan Lingkungan dan dilaporkan setiap semester kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Dinas lingkungan Hidup Prov. Kalteng dan Dinas Lingkungan Hidup Kab Seruyan, serta KLHK
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Dalam Operasional kehutanan PT Erna Djuliawati terdapat indikasi dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun besarnya masih sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku, hal ini dikarenakan PT Erna Djuliawati melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai dokumen RKL-RPL, RKUPHHK-HA dan Ketentuan/peraturan yang berlaku.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan telah sesuai dengan peraturan terbaru tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi yaitu PerMenLHK no P. 106

		/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi peraturan yang berlaku.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Erna Djuliawati telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang berdasarkan ketentuan /peraturan yang berlaku dan mencakup seluruh kelompok jenis flora dan fauna.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki prosedur pengelolaan flora, Prosedur mencakup spesies dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang ada di areal kerja
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan belum mencakup seluruh jenis hasil identifikasi, sedangkan tahapan pengelolaan baru kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pemantauan, sedangkan pengelolaan dalam bentuk pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin akibat dari kegiatan operasional kehutanan sendiri, gangguan perambahan lahan, penebangan tanpa izin dan perburuan serta kebakaran hutan yang terjadi pada beberapa lokasi.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk :	Sedang	

<p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>		
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki prosedur pengelolaan fauna, Prosedur mencakup species dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang ada di areal kerja
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan belum mencakup seluruh jenis hasil identifikasi, pengelolaan secara menyeluruh diprioritaskan pada species kunci antara lain orang utan, sedangkan tahapan pengelolaan baru kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pemantauan, sedangkan pengelolaan dalam bentuk pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Kegiatan pengkajian telah dilakukan untuk species kunci, untuk jenis dilindungi lainnya belum terlaksana.
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin akibat dari kegiatan operasional kehutanan sendiri, gangguan perambahan lahan, penebangan tanpa izin dan perburuan.
<p>4. Sosial</p>		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak</p>	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, yang tertuang

<p>dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p>		<p>pada dokumen: AMDAL, HCVF, RKU, RKT, RKAP, RO, Penilaian dampak sosial, Monografi Desa, PGM, dan dokumen pencatatan HHBK. Pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH yang teridentifikasi pada dokumen tersebut adalah Pemukiman dan Garapan Masyarakat (PGM), perladangan masyarakat, Kawasan Situs budaya dan Hutan Adat, pemanfaatan HHBK</p>
<p>Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & konflik batas kawasan berupa SOP yang telah di revisi seperti SOP Pembuatan Tata Batas Pemukiman dan Garapan Masyarakat PT Erna Djuliawati BCBB Nomor EDL/SOP/4.1, SOP Penanganan Konflik PT Erna Djuliawati BCBB Nomor EDL/SOP/4. Mekanisme tersebut telah diimplementasikan dan disepakati para pihak</p>
<p>Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Erna Djuliawati memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa SOP. Terdapat duapuluh satu SOP terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yaitu terkait hak pemanfaatan lahan, hak pemanfaatan HHBK, hak mendapatkan informasi terkait operasional PT. Erna Djuliawati. Mekanisme berupa SOP tersebut lengkap, legal dan jelas</p>
<p>Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Erna Djuliawati memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan dengan batas kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas Pemukiman dan Garapan Masyarakat, dan Batas Konsesi yang telah temu gelang</p>
<p>Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat persetujuan para pihak terhadap luas dan batas PT. Erna Djuliawati berupa SK Pengukuhan temu gelang, SK Pengukuhan Batas PGM, Batas partisipatif PGM yang disetujui</p>

		masyarakat. Masih ada konflik berupa perladangan berpindah/rotasi yang dapat dikelola dengan baik. Luas perladangan berpindah fluktuatif dan PT. Erna Djuliawati melakukan upaya sosialisasi terkait pelestarian hutan dan pola-pola pertanian menetap, untuk menekan pola perladangan berpindah
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan, berupa dokumen kebijakan umum (Landasan Pelaksanaan PHPL), Dokumen rencana sepuluh tahunan (RKUPHHK-HA), Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK tahun 2018 dan 2019), serta dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal dalam bentuk SOP. Mekanisme dalam bentuk SOP tersebut telah mengakomodir pelaksanaan kewajiban sosial terhadap masyarakat
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Erna Djuliawati memiliki bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, meliputi: sosialisasi Visi Misi, sosialisasi RKT, sosialisasi PGM, sosialisasi perladangan, sosialisasi Kawasan Lindung, dan sosialisasi PMDH (bersamaan dengan sosialisasi RKT). Bukti kegiatannya berupa BAP, Daftar Hadir, Photo, surat tugas/jalan, dan biaya pelaksanaan. Namun sosialisasi PMDH Tahun 2019 hanya dilaksanakan kepada 3 desa terdekat dengan Blok RKT 2019
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan	Baik	PT. Erna Djuliawati telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada seluruh desa-desa binaan yang berjumlah 14 Desa dan beberapa desa lainnya dengan realisasi biaya mencapai

SDH.		lebih dari 100% dari rencana. Bukti-bukti realisasi tersedia lengkap dan diakui oleh desa-desa terkait
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Terdapat laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Erna Djuliawati terhadap masyarakat secara lengkap terdiri atas dokumen Identifikasi, Laporan pelaksanaan, Laporan Monitoring, dan dokumen penilaian.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. Erna Djuliawati. Data tersebut berupa data karyawan lokal, data inventarisasi HHBK, data masyarakat yang berladang, serta data monografi desa-desa binaan yang berjumlah 15 Desa.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen Standar Operating Procedure. Terdapat enam belas SOP terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT. Erna Djuliawati memiliki dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas berupa dokumen kebijakan umum, dokumen rencana sepuluh tahunan, dokumen rencana tahunan, dokumen rencana operasional, dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh PT. Erna Djuliawati, berupa peran serta sebagai pekerja lokal, belanja kebutuhan camp dari masyarakat sekitar, dan realisasi

		kegiatan PMDH. Total Implementasi mencapai 67,29 % atau lebih dari 50 %
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT. Erna Djuliawati memiliki dokumen/laporan lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak. Dokumen-dokumen tersebut terdokumentasi dengan baik
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT. Erna Djuliawati memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP. SOP yang ada lengkap dan jelas dan bersifat implementatif, sehingga dapat mengakomodir penanganan konflik yang ada terkait operasional perusahaan hutan. Selain itu SOP telah mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Terdapat konflik dan potensi konflik, dimana berdasarkan pemetaan konflik yang mengacu Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 bahwa Tahun 2019 berstatus Rendah (Terkendali). Pemetaan dan Resolusi Konflik tersebut sudah lengkap dan sudah disampaikan kepada Instansi terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT. Erna Djuliawati memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Organisasi telah mendapat persetujuan dari perwakilan masyarakat, sumberdaya manusia memiliki kualifikasi dan kompetensi yang cukup, serta dana tersedia cukup untuk mengelola konflik dengan terselesaikannya konflik yang ada yang membutuhkan pendanaan sebagai kompensasi.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Terdapat dokumen penanganan konflik yang terjadi pada periode tahun 2017 dan 2018 hingga Agustus. Dokumen lengkap, jelas dan terdokumentasi dengan baik.
Indikator 4.5.	Baik	

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan Industrial pada PT. Erna Djuliawati didasarkan pada dokumen Perjanjian kerja Bersama yang sah dan masih berlaku. Seluruh hubungan industrial yang tertera pada dokumen PKB telah direalisasikan pada seluruh karyawan/pekerja.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT. Erna Djuliawati memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana pelatihan/training eksternal dan training internal. Pada tahun 2018 Seluruh rencana pengembangan kompetensi tersebut telah direalisasikan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan petunjuk teknis penilaian pekerja (24.11/D2/Sos/II/III) Form General Affair, Penilaian. Butir-butir dalam dokumen tersebut telah diimplementasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah dan masih berlaku. Seluruh butir-butir pada dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Erna Djuliawati berdasarkan Peta Penunjukan Areal Hutan di Wilayah

		Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, areal PT Erna Djuliawati termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 179.177 Ha, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 5.029 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal PT Erna Djuliawati terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat menara komunikasi yang berfungsi juga sebagai sarana pendukung komunikasi dan pendukung jaringan untuk pengoperasian SIPUHH.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 s.d 2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 169/VI-BUHA/2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 – 2020 atas nama PT Erna Djuliawati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Desember 2011. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Erna Djuliawati Skala 1 : 100.000

		<p>PT Erna Djuliawati juga telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 s.d 2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4000/MenLHK-PHPL/UHP/HPL1/6/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 – 2020 atas nama PT Erna Djuliawati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Juni 2018. Dilengkapi lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Erna Djuliawati Skala 1 : 100.000.</p> <p>PT Erna Djuliawati telah membuat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang telah disahkan oleh secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Erna Djuliawati melalui Keputusan Direktur Utama.</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Erna Djuliawati telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna merah pada jalur rintisan.</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah disahkan oleh Direktur Utama PT Erna Djuliawati secara <i>self approval</i> dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan 2019 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Tahun 2019.</p> <p>Pada batas blok RKT telah dibuat papan informasi Blok RKTUPHHK-HA dan tanda batas blok RKT berupa cat merah kuning vertikal ada pohon atau jalur</p>

		rintisan. Sedangkan batas petak berupa cat warna putih yang dipasang pada pohon setiap jarak setiap 20 meter dan papan kecil sebagai informasi batas petak yang dipasang di pinggir jalan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	<p>PT Erna Djulawati telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 - 2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK. 169/VI-BUHA/2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 - 2020 atas nama PT Erna Djulawati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Desember 2011. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Erna Djulawati Skala 1 : 100.000.</p> <p>PT Erna Djulawati juga telah mempunyai Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 s.d 2020 PT Erna Djulawati yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4000/MenLHK-PHPL/UHP/HPL1/6/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 - 2020 atas nama PT Erna Djulawati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Juni 2018. Dilengkapi lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Erna Djulawati Skala 1 : 100.000</p>
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Erna Djulawati tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan

penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri		tanaman industri, PT Erna Djuliawati dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan Km 96 diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 2,54 %. Sedangkan uji petik fisik kayu di TPK Antara/Logpond Kelakik diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,88 %, seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Erna Djuliawati telah mengangkut kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Kelakik dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB di TPK Hutan diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB TPK Hutan pada kolom pengurangan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	
Verifier a. Tanda-tanda PUIH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2018 dan Tahun

dilacak balak		2019 telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan dan label ID Barcode pada bontos kayu.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor pohon hasil cruising, nomor kode scaler dan label ID Barcode pada bontos dan penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Erna Djuliawati mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh perusahaan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode September 2018 – Agustus 2019, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu	Memenuhi	PT Erna Djuliawati dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai

hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		dengan tarif yang telah ditentukan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Memenuhi	
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Erna Djuliawati tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau, seluruh kayu yang dihasilkan dikirim ke industri ply mill yang merupakan satu entitas bisnis yang berada di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	Memenuhi	
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Erna Djuliawati tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dan dokumen angkutan SKSHHK
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen AMDAL terdiri dari, Laporan Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Kepala Kepala Komisi Pusat AMDAL DEPHUT berdasarkan Keputusan Komisi AMDAL DEPHUT No. 59/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 03 April 1997. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.

<p>Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>	<p>Memenuhi</p>	
<p>Verifier a. Dokumen RKL dan RPL</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari ANDAL yang telah disetujui Kepala Komisi Pusat AMDAL DEPHUT berdasarkan Keputusan Komisi AMDAL DEPHUT No. 59/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 03 April 1997. Dokumen RKL RPL mengacu kepada dokumen ANDAL yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial ekonomi budaya.</p>
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Erna Djuliawati telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 2018 dan Semester I tahun 2019 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan. implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.</p>
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Erna Djuliawati telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP.03/DISNAKERTRANS//2018 tanggal 04 Januari 2018 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p>

		(P2K3) di Perusahaan. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) untuk seluruh karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Erna Djuliawati telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam PUK KAHUT Indonesia K.SPSI PT Erna Djuliawati Logging Unit II, dan Pengurus SPSI PT. Erna Djuliawati telah didaftarkan susunan Pengurus SPSInya Periode 2018-2020 Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Erna Djuliawati telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Erna Djuliawati Unit Logging II Base Camp Bukit Beruang dengan Serikat Pekerja Kahut Indonesia (PUK SPSI KAHUT INDONESIA K-SPSI) Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah periode 2018 – 2020. PKB tersebut telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

		Pariwisata Kabupaten Seruyan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan Nomor: 560/951/DISNAKERTRANSPAR/X/2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Erna Djuliawati Logging Unit II Base Camp Bukit Beruang dengan Serikat Pekerja Kahut Indonesia (PUK SPSI KAHUT Indonesia K-SPSI), ditetapkan Kuala Pembuang tanggal 29 Oktober 2018. Ditandatanganinya oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan, Drs. Wiktor T Nyarang, SE,MM. Perjanjian Kerja Bersama berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2018 s/d 28 Oktober 2020
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan yang bekerja di areal PT Erna Djuliawati tidak terdapat karyawan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Erna Djuliawati sampai dengan Bulan Agustus 2019 untuk lokasi camp memiliki jumlah karyawan sebanyak 967 orang terdiri dari dari Dept Produksi 245, Pekerja ML D 232, Pekerja FE & OA 168, Pekerja Dept. PGA 165, Pekerja DPH 141, Dept. PMDH 16

Depok, 18 Oktober 2019

No. : 149.3/SKEP-MUTU/X/2019
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL PT Erna Djuliawati

Kepada Yth.
Direktur PT Erna Djuliawati
Lyman Wing, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav 1, Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Erna Djuliawati, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-006
Masa Berlaku Sertifikat : 06 November 2017 s/d 05 November 2022
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 15/KPTS-IV/1999 Tanggal 18 Januari 1999
b. Luas : ± 184.206 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilikan : 23 September – 02 Oktober 2019
Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor/ Bid. Ekologi),
Ir. Suwanto (Auditor Bid. Prasyarat),
Muhammad Ridwan, S.Hut (Auditor Bid. Produksi),
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Bid. Sosial),
Rinaldy Ramadhan D, S.Hut (Auditor Bid. VLK)
Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 96,97% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : -
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-3 : September 2020

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur